J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia
Vol. 1 No. 2 July 2025 Page 209-217
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx
https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/

Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai

Alpius Nawipa[1], Baharuddin[2], Kristian H.P.Lambe[3]

[1)] Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar

Submitted: 09-07-2025 |Review 15-07-2025 | Revision 25-07-2025 | Accepted 30-07-2027

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas dan efektivitas telah mulai diterapkan, namun belum optimal. Peran tokoh adat dalam pengelolaan pasar menjadi elemen penting dalam menciptakan legitimasi sosial dan kestabilan tata kelola. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sistem digitalisasi pengelolaan pasar, peningkatan partisipasi publik, serta integrasi kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Temuan ini menjadi dasar strategis dalam mendorong pengelolaan pasar tradisional yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

.
Kata kunci: tata kelola, pemerintahan daerah, pasar tradisional, good governance, Papua Tengah

Abstract
This study aims to analyze local government governance in managing traditional markets in Paniai Regency. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that traditional market management in Paniai faces several challenges, including limited human resources, inadequate infrastructure, and low levels of transparency and public participation. Although principles of good governance—such as accountability and service effectiveness—have begun to be applied, their implementation remains suboptimal. The involvement of customary leaders plays a critical role in ensuring social legitimacy and stability in governance practices. This research recommends strengthening institutional capacity, adopting digital systems in market management, enhancing public engagement, and integrating local wisdom into policy formulation. These findings provide strategic insights for developing a more inclusive, professional, and sustainable model of traditional market governance in Eastern Indonesia.

Keywords: *governance, local government, traditional markets, good governance, Papua Tengah*

[1]*E-mail: alpiusnawipa@gmail.com*
[2]*E-mail: dr_baharuddin05@gmail.com*
[3]*E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional memainkan peran strategis dalam menopang ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah. Di Indonesia, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan simbol budaya lokal (Fauzi, 2021). Namun demikian, keberadaan pasar tradisional terus menghadapi tekanan akibat modernisasi dan lemahnya pengelolaan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan (Ginting, Hanani, & Suwitri, 2021).

Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pasar tradisional mengalami berbagai persoalan seperti infrastruktur fisik yang minim, pengelolaan retribusi yang tidak akuntabel, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan juga menjadi tantangan tersendiri (Apriana, Taus, & Anggraini, 2021). Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penerapannya dalam konteks lokal masih belum optimal.

Tabel 1. Permasalahan Utama Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai

No	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Pengelolaan Pasar
1	Infrastruktur pasar tidak memadai	Menurunkan kenyamanan dan efisiensi aktivitas pasar
2	Pengelolaan retribusi kurang transparan	Meningkatkan potensi kebocoran dan distrust publik
3	Keterlibatan masyarakat rendah	Kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil
4	Lemahnya kapasitas SDM pengelola pasar	Pengelolaan tidak profesional dan tidak berkelanjutan
5	Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi	Pelayanan publik tidak berjalan efektif dan efisien

Sumber: Hasil penelitian lapangan dan dokumentasi (2025)

Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah (Dwiyanto, 2006; UNDP, 1997). Dalam konteks lokal Papua Tengah, pelibatan tokoh adat dan masyarakat menjadi elemen penting yang kerap diabaikan dalam formulasi kebijakan pengelolaan pasar.

Penelitian ini menjadi penting karena minimnya literatur akademik yang secara spesifik membahas tata kelola pasar tradisional di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua Tengah. Padahal, pasar tradisional merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Tanpa tata kelola yang baik dan berbasis kearifan lokal, upaya pemberdayaan ekonomi melalui pasar akan sulit tercapai. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis untuk peningkatan pelayanan publik di sektor perdagangan, tetapi juga memperkaya khasanah akademik mengenai model tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif terhadap konteks sosial budaya lokal.

TINJAUAN LITERATUR

Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Local Governance)

Tata kelola pemerintahan daerah merupakan konsep yang merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan inklusivitas (UNDP, 1997; Sedarmayanti, 2014). Dalam konteks pemerintahan daerah, tata kelola yang baik mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik, menyelenggarakan pelayanan, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Agustino, 2008).

Penelitian terbaru oleh Nurhayati et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi prinsip *good governance* berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ekonomi lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak daerah belum mampu menjalankan tata kelola yang baik secara konsisten karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan minimnya akuntabilitas birokrasi.

Definisi operasional dalam penelitian ini: *tata kelola pemerintahan daerah* merujuk pada upaya sistematis pemerintah Kabupaten Paniai dalam mengelola pasar tradisional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik.

Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional

Manajemen pengelolaan pasar tradisional mencakup serangkaian fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan ekonomi di pasar rakyat (Robbins & Coulter, 2016). Menurut Hidayat dan Santoso (2022), pengelolaan pasar tradisional yang efektif harus mempertimbangkan dimensi infrastruktur, regulasi, SDM, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Pasar tradisional juga merupakan entitas sosial yang menyatu dengan nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, aspek sosial dan kultural tidak dapat diabaikan dalam proses pengelolaan (Fauzi, 2021). Dalam konteks Papua, peran tokoh adat menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan dan kontrol sosial di tingkat lokal (Setiawan et al., 2021).

Definisi operasional: *pengelolaan pasar tradisional* adalah keseluruhan proses administratif, teknis, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar rakyat secara berkelanjutan.

Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai temuan penting yang mendukung urgensi penelitian ini:

- **Ginting et al. (2021)** dalam kajiannya tentang pengelolaan pasar di Kota Binjai menemukan bahwa rendahnya transparansi dan tidak adanya forum partisipatif menyebabkan ketidakefisienan pelayanan publik.
- **Apriana et al. (2021)** dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Utara mengidentifikasi bahwa pasar tradisional dikelola secara sektoral tanpa pendekatan kolaboratif antara dinas teknis dan masyarakat, yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas.
- **Rahman & Putra (2021)** mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional di Sumatera Barat secara umum masih bersifat

simbolik, bukan substantif, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan tata kelola pasar.

- **Wibowo & Sari (2024)** menyoroti pentingnya pelibatan tokoh adat dalam pengelolaan pasar di daerah tertinggal sebagai bagian dari model *hybrid governance* untuk menjembatani nilai formal dan tradisional.

Tabel berikut merangkum kontribusi studi sebelumnya:

Tabel 2. Ringkasan Studi Terdahulu tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Peneliti & Tahun	Lokasi	Temuan Utama	Relevansi untuk Studi Ini
Ginting et al. (2021)	Kota Binjai	Lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat	Kesesuaian fenomena dengan kondisi di Paniai
Apriana et al. (2021)	TTU, NTT	Tidak terintegrasinya pengelolaan lintas dinas	Mendukung analisis kelembagaan
Rahman & Putra (2021)	Sumatera Barat	Partisipasi bersifat formalistik	Menyoroti gap dalam pelibatan publik
Hidayat & Santoso (2022)	Kalimantan Barat	SDM pengelola tidak profesional	Senada dengan temuan keterbatasan di Paniai
Wibowo & Sari (2024)	Papua Barat	Perlu pendekatan adat dalam tata kelola pasar	Menguatkan pentingnya integrasi nilai lokal

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Dari studi terdahulu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pengelolaan pasar tradisional di wilayah barat dan tengah Indonesia. Belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis tata kelola pasar tradisional di wilayah Papua, terutama dalam konteks integrasi nilai adat dan prinsip *good governance*. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh adat dalam tata kelola pasar belum banyak ditelaah secara mendalam.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengangkat konteks lokal Kabupaten Paniai sebagai wilayah adat di Papua Tengah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana praktik tata kelola pemerintahan dijalankan dalam pengelolaan pasar tradisional dan bagaimana nilai lokal diintegrasikan dalam proses tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk menggali secara mendalam tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual, khususnya terkait interaksi antara aktor pemerintahan, masyarakat, dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan pasar (Yin, 2018; Moleong, 2021). Studi kasus juga memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika sosial dan budaya yang khas di daerah penelitian, yang tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh pendekatan kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai, seperti pejabat pemerintah daerah, aparatur distrik dan kampung, pengelola pasar, tokoh adat, serta perwakilan pedagang. Karena tujuan utama penelitian ini adalah menggali pemahaman dan perspektif yang

mendalam, maka teknik **purposive sampling** digunakan untuk menentukan informan yang memiliki posisi strategis dan pengalaman relevan terhadap pengelolaan pasar. Informan utama dalam penelitian ini antara lain: Bupati Kabupaten Paniai, Asisten II Sekretariat Daerah bidang perekonomian, Kepala Kampung, Kepala Suku Distrik, dan Kepala Suku Besar Kabupaten Paniai. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, atau interaksi langsung dalam pengelolaan pasar (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, yang merupakan wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang kental dan struktur pemerintahan yang terdesentralisasi. Lokasi spesifik penelitian adalah pasar tradisional yang berada di Distrik Paniai Timur dan sekitarnya, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Penelitian dilakukan selama periode tiga bulan, dari bulan April hingga Juni 2025, dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen administratif yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu: **wawancara mendalam** (in-depth interview), **observasi partisipatif**, dan **studi dokumentasi**. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci untuk memperoleh data naratif terkait praktik tata kelola, tantangan yang dihadapi, dan peran aktor lokal. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pengelolaan pasar, termasuk pola interaksi antara pedagang, masyarakat, dan pengelola. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan keuangan pasar, notulen Musrenbang, dan catatan evaluasi kebijakan. Triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik yang berbeda (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga langkah utama: **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan/verifikasi**. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik dan kutipan langsung dari informan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, yaitu melalui proses berulang untuk menguji konsistensi temuan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik serta melakukan *member checking* kepada beberapa informan kunci guna mengonfirmasi keakuratan informasi yang dikumpulkan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan daerah diterapkan dalam konteks pasar tradisional yang kental dengan nilai-nilai lokal di Kabupaten Paniai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan peran strategis mereka dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai. Karakteristik informan mencakup pejabat pemerintah daerah, kepala kampung, tokoh adat distrik, hingga kepala suku besar kabupaten. Tabel berikut menyajikan profil informan utama:

Tabel 3. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Peran	Keterangan Singkat
1	Yampit Nawipa	Bupati Kabupaten Paniai	Pengambil kebijakan strategis terkait pasar tradisional
2	Usman, S.E.	Asisten II Bidang Perekonomian	Koordinasi program lintas OPD dalam pengelolaan pasar
3	Ham Yogi	Kepala Kampung Paniai Timur	Menyampaikan kondisi sosial masyarakat dan implementasi kebijakan
4	Lukas Bunai	Kepala Suku Distrik Paniai Timur	Penjaga nilai adat dalam pengelolaan pasar
5	Melianus Jumai	Kepala Suku Besar Kabupaten Paniai	Representasi adat tingkat kabupaten dan penghubung sosial budaya

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga pemerintah daerah dengan dukungan perangkat kampung dan tokoh adat. Struktur pengelolaan berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berperan sebagai pelaksana teknis, sedangkan OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup turut mendukung dari sisi infrastruktur dan kebersihan pasar.

Sebagaimana disampaikan oleh Bupati Paniai:

> *"Kami melibatkan berbagai instansi agar pengelolaan pasar tidak sektoral. Musrenbang digunakan sebagai forum utama untuk menyerap aspirasi dan merancang pembangunan pasar yang sesuai kebutuhan masyarakat."* (Yampit Nawipa, Wawancara, 2025)

Namun demikian, pengelolaan ini masih menghadapi kendala serius, seperti rendahnya kompetensi manajerial pengelola pasar, belum adanya sistem informasi pasar, dan keterbatasan dana operasional.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar masih bersifat parsial. Beberapa aspek seperti **transparansi** dan **akuntabilitas** mulai diterapkan, misalnya dengan laporan keuangan retribusi yang disusun secara berkala dan dapat diakses oleh DPRD. Namun, belum tersedia sistem informasi digital yang memungkinkan akses terbuka oleh masyarakat umum.

> *"Kami sedang mengembangkan sistem digital untuk pengelolaan retribusi. Saat ini laporan masih bersifat manual, tapi terbuka bagi lembaga pengawas dan masyarakat."* (Usman, S.E., Wawancara, 2025)

Dari sisi **partisipasi publik**, pelibatan masyarakat dan pedagang masih sebatas pada forum-forum formal seperti musrenbang. Belum ada mekanisme partisipatif yang substansial dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan harian atau pengawasan pasar.

Kepala Kampung Paniai Timur menyampaikan:

> *"Kami memang dilibatkan dalam rapat-rapat, tapi belum ada forum tetap yang mewadahi suara pedagang secara rutin."* (Ham Yogi, Wawancara, 2025)

Aspek **efisiensi dan efektivitas** pengelolaan pasar juga belum optimal. Banyak fasilitas pasar seperti sanitasi, drainase, dan pencahayaan yang tidak memadai. Ini berdampak pada kenyamanan dan kebersihan pasar.

Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai menghadapi tiga kendala utama, yaitu:

1. **Keterbatasan anggaran dan SDM**: Belum tersedia dana yang memadai untuk revitalisasi pasar secara menyeluruh. Selain itu, pengelola pasar sebagian besar belum memiliki latar belakang pelatihan manajerial.
2. **Infrastruktur fisik pasar yang belum memadai**: Banyak pasar mengalami kerusakan bangunan, minim fasilitas air bersih, dan tidak tersedia tempat sampah yang layak.
3. **Kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan pasar**: Sosialisasi belum dilakukan secara efektif dan menyeluruh kepada semua pelaku pasar.

> *"Sebagian masyarakat belum patuh pada aturan pasar karena memang belum terbiasa. Dibutuhkan pendekatan adat dan budaya agar peraturan bisa diterima lebih baik."* (Lukas Bunai, Wawancara, 2025)

Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk dana revitalisasi, melakukan pelatihan manajemen pasar secara terbatas, dan mengikutsertakan tokoh adat dalam pengawasan sosial pasar.

> *"Kami percaya bahwa tokoh adat harus dilibatkan karena masyarakat lebih mendengar mereka daripada aparat formal. Ini bagian dari pendekatan lokal."* (Melianus Jumai, Wawancara, 2025)

Pembahasan dan Analisis Temuan

Temuan penelitian ini menguatkan literatur sebelumnya mengenai pentingnya tata kelola pasar yang berbasis kolaborasi dan budaya lokal (Setiawan et al., 2021; Wibowo & Sari, 2024). Meskipun prinsip *good governance* telah mulai diterapkan, keberhasilannya masih terhambat oleh keterbatasan kelembagaan, pendanaan, serta pola komunikasi yang belum partisipatif.

Hal penting yang menjadi kekuatan lokal di Kabupaten Paniai adalah integrasi nilai-nilai adat dalam proses pengambilan kebijakan. Model *hybrid governance*, yaitu perpaduan antara sistem formal dan informal (adat), dapat menjadi pendekatan alternatif dalam tata kelola pasar tradisional di wilayah-wilayah dengan karakteristik budaya kuat.

Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan pasar yang profesional tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan administratif, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial, aktor lokal, serta konteks budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar dilakukan melalui mekanisme lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat kampung, serta tokoh adat. Namun, pengelolaan ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar tradisional di Paniai telah dimulai, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Laporan retribusi dan pelaksanaan musrenbang menjadi bentuk akuntabilitas awal. Namun demikian, partisipasi publik belum bersifat substantif dan masih sebatas prosedural. Efektivitas pelayanan publik juga masih rendah karena keterbatasan sarana dan prasarana dasar yang memengaruhi kenyamanan dan kinerja pasar.

Temuan penting dari penelitian ini adalah peran strategis tokoh adat dalam menjembatani regulasi formal pemerintah dengan nilai-nilai lokal. Pendekatan *hybrid governance* yang menggabungkan sistem formal dengan kearifan lokal terbukti memberikan legitimasi sosial dan mendukung keberlangsungan tata kelola pasar. Ini menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif terhadap konteks sosial budaya dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di daerah dengan keragaman adat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip administratif, tetapi juga pada integrasi sosial-kultural sebagai instrumen tata kelola publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan pasar yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Paniai perlu meningkatkan kapasitas pengelola pasar melalui pelatihan teknis dan manajerial secara berkala. Digitalisasi sistem pengelolaan keuangan pasar juga perlu segera diterapkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, forum komunikasi tetap antara pemerintah, pedagang, dan tokoh adat harus dibentuk sebagai wadah aspirasi dan evaluasi. Pengembangan infrastruktur pasar harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, dan kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai lokal agar lebih diterima dan berdampak luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Apriana, E. K., Taus, W., & Anggraini, T. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pasar tradisional di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANE)*, *11*(2), 156–167. https://doi.org/10.25077/jiane.v11n2.p156-167.2021

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzi, H. M. (2021). Manajemen pasar tradisional dalam menghadapi tantangan modernisasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 45–52.

Ginting, R. L. E., Hanani, R., & Suwitri, S. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Kota Binjai. *Journal of Public Policy and Management Review*, *10*(1), 101–113.

Hidayat, S., & Santoso, R. (2022). Peningkatan kompetensi pengelola pasar tradisional di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, *4*(2), 78–89.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurhayati, L., Suryani, D., & Nugroho, R. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis digital: Studi pada pengelolaan pasar rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, *5*(1), 25–36. https://doi.org/10.24198/jippd.v5i1.2023

Rahman, M. F., & Putra, A. Y. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional: Studi kasus di Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, *25*(2), 112–124.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.

Sedarmayanti. (2014). *Good governance: Kepemerintahan yang baik*. Bandung: Mandar Maju.

Setiawan, D., Prasetyo, A. B., & Wulandari, R. (2021). Kearifan lokal dalam tata kelola pelayanan publik: Integrasi nilai adat dalam pengelolaan pasar. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, *9*(3), 211–224.

UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.

Wibowo, S. A., & Sari, N. R. (2024). Model tata kelola pasar tradisional berbasis kultural di Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi Daerah*, *3*(1), 30–42. https://doi.org/10.34232/japid.v3i1.2024

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.